

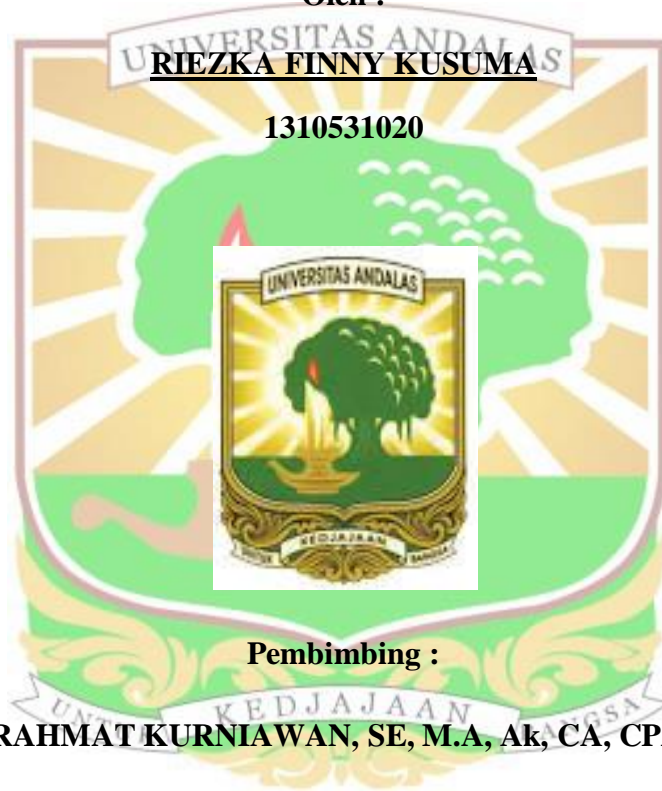
**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (BPHTB) DAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-
P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA DAN JAWA**

SKRIPSI

Oleh :

RIEZKA FINNY KUSUMA

1310531020



Pembimbing :

RAHMAT KURNIAWAN, SE, M.A, Ak, CA, CPAI

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

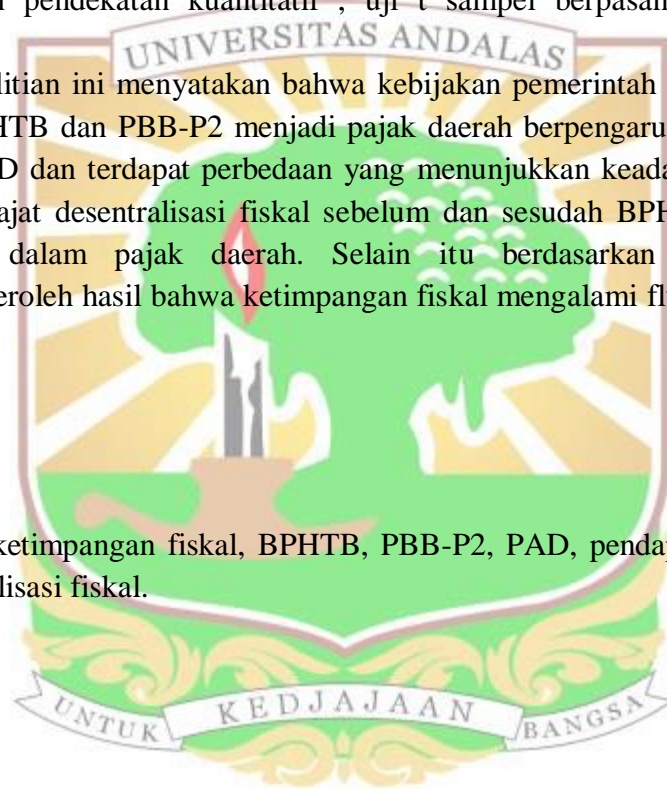
2017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh empiris, sebaran, dan ketimpangan fiskal kabupaten/kota sebelum dan sesudah BPHTB dan PBB-P2 dikalkulasikan dalam penerimaan pajak daerah di Sumatera dan Jawa. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggaran BPHTB, PBB-P2, PAD, total pendapatan daerah, dan jumlah penduduk per provinsi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggaran BPHTB dan PBB-P2 pada 267 kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Jawa. Sampel yang digunakan sebanyak 182 kabupaten/kota dikarenakan ketidaklengkapan data. Sedangkan dalam analisis data digunakan pendekatan kuantitatif, uji t sampel berpasangan, dan Indeks Williamson.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam melakukan pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD dan terdapat perbedaan yang menunjukkan keadaan yang semakin baik antara derajat desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah BPHTB dan PBB-P2 dikalkulasikan dalam pajak daerah. Selain itu berdasarkan formula Indeks Williamson diperoleh hasil bahwa ketimpangan fiskal mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Kata Kunci : ketimpangan fiskal, BPHTB, PBB-P2, PAD, pendapatan daerah, dan derajat desentralisasi fiskal.



ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of empirical, distribution, and fiscal imbalances of regencies / cities before and after BPHTB and PBB-P2 calculated in local tax revenue in Sumatra and Java. The variables used in this study are BPHTB budget, PBB-P2, PAD, total regional income, and population in each province. The population on this study are all budget of BPHTB and PBB-P2 in 267 regencies / cities in Sumatra and Java. The sample used is 182 regencies / cities due to incomplete data. While in the data analysis used quantitative approach, paired sample t test, and Index Williamson. The results of this study indicate that government policies in transferring BPHTB and PBB-P2 to local taxes have a positive effect on PAD revenues and there are differences that indicate a better situation between the degree of fiscal decentralization before and after BPHTB and PBB-P2 are calculated in local taxes. On the other hand, based on the Index Williamson formula obtained results that fiscal imbalances fluctuate from year to year.

Keywords: *fiscal imbalance, BPHTB, PBB-P2, PAD, regional income, degree of fiscal and decentralization*

